

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Selain bertujuan untuk menaikkan pendapatan nasional riil, tujuan pembangunan juga untuk meningkatkan produktifitas. Tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian). Ekonomi pembangunan tidak hanya menggambarkan jalannya pembangunan ekonomi saja, tetapi juga menganalisa faktor-faktor dari perkembangan tersebut (Irawan dan Suparmoko, 1992:5).

Kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa (Tjiptoherijanto, 1996:3). Apabila kualitas tenaga kerja baik tentunya akan meningkatkan produktifitas kerja yang meningkatkan Produk Nasional Bruto suatu negara. *Human capital* mengandung pengertian pengetahuan dari seseorang yang memberikan kontribusi berupa keterampilan dalam suatu aktivitas yang produktif. Pengetahuan didasarkan pada pendidikan umum ditambah dengan penelitian dan penyebaran pengetahuan melalui pendidikan kejuruan dan latihan. Investasi dalam sumber daya manusia ini menghasilkan pengembangan teknologi, produk, dan proses produksi yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi, dan sama pentingnya modal fisik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

(Christopher Pass & Bryan Lowes, 1994:278).

Tujuan utama faktor produksi dalam meningkatkan kualitas (kualitas kerja dalam proses produksi) adalah mendapatkan balas jasa yang disebut upah dan gaji sebagai harga dari tenaga kerja tersebut (Irawan dan Suparmoko, 1992:73). Upah yang diterima oleh tenaga kerja merupakan pembayaran yang diberikan bagi seorang tenaga kerja untuk penggunaan tenaga kerjanya sebagai suatu faktor produksi. Upah biasanya dibayarkan atas dasar mingguan dan besarnya akan tergantung pada tingkat upah per jam dan jumlah jam yang merupakan dasar kerja mingguan. Sebagai tambahan, pihak pekerja dapat menambahkan upah dasar mereka dengan bekerja lembur. Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 27, ayat (2) dan penjabarannya dalam hubungan industrial pancasila. Sistem pengupahan harus memiliki beberapa fungsi dan prinsip antara lain: (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan; (3) memuat pemberian intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional (Simanjuntak, 1998:125).

Di Indonesia, sebagian besar permasalahan antara buruh dan pengusaha terjadi karena masalah upah. Pihak pengusaha berharap kenaikan upah minimum regional (UMR) tidak tinggi karena akan mempengaruhi naiknya *labor cost*, sementara itu buruh selalu khawatir karena upah di tahun depan tetap tidak akan cukup untuk menghidupi dirinya dan atau keluarganya dengan layak.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh akibat adanya ketidakseimbangan *Supply* dan *Demand* di pasar tenaga kerja, negara menciptakan upah minimum regional. Walaupun kenyatannya, upah minimum regional tersebut tidak dapat memenuhi seluruh jenis komoditi yang akan dikonsumsi. Besarnya UMR

yang ditetapkan oleh pemerintah dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Inflasi/Indeks Harga Konsumen (IHK), kondisi pasar tenaga kerja, upah yang berlaku secara regional, perkembangan perekonomian, dan pendapatan per kapita, dengan menyerap aspirasi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi tingginya tingkat pencari kerja di Indonesia serta SDM yang rendah akan dijadikan alasan untuk menekan biaya upah buruh. Hal ini disebabkan oleh kondisi *Supply* dan *Demand* di pasar tenaga kerja yang tidak berimbang ditambah dengan tingkat SDM buruh yang masih rendah maka tingkat upah akan cenderung menurun. Lain halnya dengan industri-industri yang kompetitif. Industri-industri yang kompetitif terlihat membayar upah yang tidak lebih rendah, hal ini mungkin terkait bahwa persaingan pasar output menyebabkan persaingan untuk memperoleh input tenaga kerja yang lebih baik dan dengan demikian memberi upah yang relatif tinggi (Setiaji, 2001:79).

Seperti propinsi-propinsi lainnya di Indonesia, masalah pembangunan juga dialami Propinsi D.I.Yogyakarta yang mengalami surplus tenaga kerja. Masalahnya adalah surplus tenaga kerja tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Masalah ini dapat dilihat secara nyata dalam penyerapan seluruh tenaga kerja yang ada. Dari jumlah pencari kerja di D.I.Yogyakarta pada tahun 1989, banyaknya pencari kerja yang terdaftar adalah sebesar 143.399 jiwa, tahun 1996 berkurang menjadi 140.054 jiwa dan tahun 2002 pencari kerja terdaftar adalah 106.923 jiwa. Laju penurunan pengangguran yang cukup baik yaitu 2,33% dalam tahun 1989 – 1996, menjadi 23,66% dalam tahun 1996 – 2002. Apabila dianalisa sisa pencari kerja (pengangguran) tahun 1989 – 1996, laju sisa pencari kerja menurun sebesar 37,71% dilihat dari besarnya persentase sisa pendaftar pada pencari kerja terdaftar di tahun

1989 sebesar 55,51% dan pada tahun 1996 sebesar 34,58%. Akan tetapi pada tahun 1996 – 2002, laju persentase sisa pekerja mengalami peningkatan sebesar 48,85% (lihat Tabel 1.1). Penurunan serta peningkatan persentase sisa pekerja ini mungkin terjadi karena adanya kenyataan bahwa pasar tenaga kerja di D.I.Yogyakarta tidak sempurna. Artinya, meskipun total penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja tetap saja masih terdapat pengangguran, atau biasa disebut *frictional/natural unemployment*. Ketidaktersempurnaan pasar tenaga kerja timbul, misalnya karena keahlian/keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan yang diminta serta sasaran strategis pembangunan D.I.Yogyakarta belum tepat mengenai pemerataan kesempatan kerja yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia seutuhnya melalui jalur pendidikan dan latihan, atau *human investment*.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Propinsi D.I.Yogyakarta
Tahun 1989, 1996, dan 2002

Tahun	Pendaftar			Penempatan/Penghapusan			(Sisa Pengangguran)			
	Jiwa	Perubahan		Jiwa	Perubahan		Jiwa		Perubahan	
		Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1989	143.399	-	-	63.799	-	-	79.600	55,51	-	-
1996	140.054	-3.345	-2,33	91.628	27.829	43,62	48.426	34,58	-20,93	-37,71
2002	106.923	-33.131	-23,66	51.892	-39.736	-43,37	55.031	51,47	16,89	48,85

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi D.I.Yogyakarta, 2003, diolah.

Tujuan pembangunan manusia seutuhnya adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan menciptakan manusia yang terdidik serta dibekali keahlian dan keterampilan untuk mampu bekerja produktif, sehingga tidak saja mampu menciptakan kerja untuk diri sendiri (*self employed*) tetapi juga mampu menciptakan kerja untuk orang lain (*employment creation, job creation*). Masalah pemerataan kesempatan kerja di D.I.Yogyakarta tidak diikuti dengan penerimaan upah yang layak bagi pihak tenaga kerja. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (*Cost of Living Survey*)

yaitu tingkat harga-harga umum dari barang dan jasa yang diukur dengan suatu indeks harga di Yogyakarta, biaya untuk hidup tidaklah cukup bagi pekerja jika upah yang diterima pihak pekerja sebesar upah minimum regional.

Tabel 1.2

Upah Minimum Regional Propinsi D.I.Yogyakarta dan Konsumsi per Kepala Rumah Tangga tiap Bulan Berdasarkan Survei Biaya Hidup di Yogyakarta Tahun 1989, 1996, dan 2002

Tahun	UMR				SBH		
	Harian	Bulanan	Perubahan		Nilai	Perubahan	
			Jumlah	%		Jumlah	%
1989	700	21.000	-	-	263.323,20	-	-
1996	3.220	96.600	75.600	360,00	608.002,00	344.678,80	130,90
2002	12.000	360.000	263.400	272,67	1.190.151,35	582.149,35	95,75

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi D.I.Yogyakarta dan BPS – Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2003, diolah.

Keterangan: UMR = Upah Minimum Regional,
SBH = Survei Biaya Hidup (Cost of Living Suvey).

Dengan total biaya hidup sebesar Rp. 263.323,20 pada tahun 1989 seorang pekerja dengan upah Rp. 21.000,- per bulan memiliki hutang sebesar Rp. 242.323,20. Apabila dilihat lajunya, tahun 1989 – 1996 UMR bulanan mengalami perubahan sebesar 360,00%, sedangkan laju biaya untuk hidup di Yogyakarta sebesar 130,90%. Upah yang diterima pekerja berdasarkan upah minimum regional pada tahun 1996 masih belum dapat memenuhi kebutuhannya, di mana pada tahun 1996 Upah Minimum Regional Propinsi D.I.Yogyakarta sebesar Rp. 96.600,-. Begitu juga dengan tahun 2002, di mana biaya hidup per kepala rumah tangga sebesar Rp. 1.190.151,35 tidak dapat dipenuhi dengan upah minimum regional yang diterima pekerja pada tahun 2002 (lihat Tabel 1.2). Rendahnya Upah Minimum Regional jika dibandingkan Survei Biaya Hidup di Yogyakarta akan mengakibatkan tuntutan kenaikan upah demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Cost of Living Survey dipengaruhi oleh laju inflasi sebagai akibat dari naiknya harga berbagai macam barang secara terus-menerus. Inflasi merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Jika inflasi naik maka jumlah uang yang diminta oleh masyarakat akan bertambah atas dasar ekpektasi (harapan) bahwa inflasi tahun depan meningkat. Keadaan ini dapat diartikan bahwa peningkatan laju inflasi akan mempengaruhi besarnya jumlah uang yang diminta oleh masyarakat, di mana laju inflasi itu sendiri mungkin akan meningkat karena peningkatan harga-harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat semakin besar. Lihat Tabel 1.2 dan Tabel 1.3, peningkatan inflasi diikuti dengan meningkatnya Upah Minimum Regional pada tahun 1996 – 2002. Perubahan laju inflasi sebesar 4.151,72% diikuti meningkatnya laju UMR sebesar 272,67%. Jadi tingkat inflasi berpengaruh secara positif terhadap jumlah uang yang diminta oleh masyarakat. Tingkat inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen per tahun (Christopher Pass & Bryan Lowes, 1994:303).

Tabel 1.3
 Nilai Laju Inflasi di Propinsi D.I.Yogyakarta
 Tahun 1989, 1996, dan 2002 (2002 = 100)

Tahun	Laju Inflasi (IHK)		
	Nilai	Perubahan	
		Jumlah	%
1989	5,51	-	-
1996	0,29	-5,22	-94,74
2002	12,33	12,04	4.151,72

Sumber: BPS – Indikator Ekonomi D.I.Yogyakarta, dan Indikator Tingkat Hidup Pekerja, 2003, diolah.

Jumlah uang yang diminta dalam bentuk permintaan kenaikan upah sebagai dampak dari kenaikan inflasi oleh pihak pekerja, sejalan dengan keinginan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi untuk menaikkan keberadaan upah minimum regional dengan mengusulkan agar kenaikan upah

minimum regional tiap tahunnya berdasarkan inflasi (Anonim, 2004:7). Hal ini dikarenakan IHK menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada sekelompok barang dan jasa yang mewakili konsumsi masyarakat rata-rata di wilayah perkotaan. Ini merupakan suatu sinyalmen dan kampanye terbuka untuk menekan kenaikan upah minimum regional menjelang bekerjanya Komisi Pengupahan yang akan merumuskan upah minimum provinsi/kabupaten/kota tahun 2005 (<http://www.alni.org/Upah%20Buruh%20yang%20Diliberalakan%20%28TS%29.htm>),

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa peranan upah bagi tenaga kerja dalam meningkatkan sumber daya manusia dan motivasi pekerja menjadi sangat penting, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Upah Minimum Regional Tenaga Kerja di Propinsi D.I.Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disampaikan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel Laju Inflasi Harapan dan Pengangguran terhadap Upah Minimum Regional di Propinsi D.I.Yogyakarta.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh variabel Laju Inflasi Harapan terhadap Upah Minimum Regional di Propinsi D.I.Yogyakarta, tahun 1984 – 2004.
2. Pengaruh variabel Pengangguran terhadap Upah Minimum Regional di

Propinsi D.I.Yogyakarta, tahun 1984 – 2004.

3. Pengaruh secara bersama-sama Laju Inflasi Harapan dan Pengangguran terhadap Upah Minimum Regional di Propinsi D.I.Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1). Bagi sektor industri.

- i. Untuk meningkatkan motivasi kepada pengusaha sektor industri terhadap pentingnya upah dalam *demand* tenaga kerja terhadap peningkatan produktifitas perusahaan itu sendiri.
- ii. Untuk bahan pertimbangan kepada pengusaha sektor industri untuk memperhatikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam menetapkan upah.

2). Bagi pembaca.

Untuk menambah bacaan, mengenai ekonomi mikro yaitu tentang kecenderungan upah di D.I.Yogyakarta yang berperan semakin penting sejalan dengan semakin besarnya porsi tenaga kerja yang menggantungkan diri dari pendapatan upah.

3). Bagi peneliti.

Ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sebagai pertanggungjawaban akademis, dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4). Bagi ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menambah kepustakaan di bidang ekonomi mikro atas dasar pemahaman dalam praktek serta sebagai bahan pembandingan untuk penelitian serupa.

1.5. Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Laju Inflasi Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Propinsi D.I.Yogyakarta.
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional di Propinsi D.I.Yogyakarta.
3. Laju Inflasi Harapan dan Pengangguran secara bersama-sama signifikan secara statistik dalam mempengaruhi Upah Minimum Regional di Propinsi D.I.Yogyakarta.

1.6. Definisi Operasional Variabel

Dalam melakukan studi empiris definisi operasional variabel yang dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

a. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah harian tetap terendah yang diterima buruh/pekerja selama sebulan setiap tahunnya, dengan asumsi 30 hari kerja tiap bulan. Penetapan Upah Minimum Regional mempertimbangkan 6 faktor, yaitu Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pekerja lajang, Indeks Harga Konsumen (IHK), Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, Upah yang berlaku di daerah perbatasan, Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian. Dari 6 faktor tersebut, faktor KHM menjadi acuan utama dan disepakati besarnya Upah Minimum Regional Propinsi D.I.Yogyakarta sama dengan Kebutuhan Hidup Minimum (Anonim, 2004:4).

b. Laju Inflasi Harapan

Laju inflasi yang diharapkan adalah kecenderungan yang mendasari terjadinya Inflasi (Lipsey, dkk., 1991:271). Angka laju inflasi yang diharapkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus Jhon Gurley dengan menghitung harga harapan yang dikembangkan Insukindro dan Sukanto (1985), untuk kasus ekspor dan impor di Indonesia yang dapat pula dikembangkan untuk menentukan harga pengharapan pada umumnya. Formulasinya sebagai berikut (Insukindro, 1995:150);

$$P_t^e = 0,6P_t + 0,3P_{t-1} + 0,1P_{t-2}$$

di mana: P_t^e adalah harga Pengharapan pada periode t .

P_t, P_{t-1} , dan P_{t-2} merupakan harga pada periode $t, t-1$, dan $t-2$.

Kemudian setelah diolah, harga harapan tersebut dimasukan ke dalam rumus Laju Inflasi Harapan sebagai berikut;

$$LI_t^e = \frac{P_t^e - P_{t-1}^e}{P_{t-1}^e} \times 100\%$$

c. Pengangguran

Pengangguran adalah selisih dari sejumlah laki-laki dan perempuan yang mencari pekerjaan dan terdaftar (memiliki kartu kuning) dengan jumlah Penempatan/Penghapusan tenaga kerja. Dengan kata lain pengangguran merupakan sisa dari sejumlah laki-laki dan perempuan yang mencari pekerjaan. Variabel pengangguran dalam penelitian ini hanya mencakup permintaan dan penawaran efektif. Dalam ekonomi, permintaan efektif berarti permintaan yang didukung oleh uang yang cukup untuk membeli barang (Stoiner and Hague, 1985:38). Barang yang dimaksud dalam penelitian ini berupa sumber daya manusia sebagai faktor produksi.

Sedangkan penawaran efektif adalah tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan dan sedang (terdaftar) mencari pekerjaan.

1.7. Metode Penelitian

Pada bagian ini mencakup alat dan prosedur yang akan digunakan dalam penelitian mencakup jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Prosedur penelitian menggunakan tahapan atau urutan pelaksanaan penelitian.

1.7.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi data laju Upah Minimum Regional, Laju Inflasi Harapan, dan Pengangguran yang terjadi di Propinsi D.I.Yogyakarta, selama periode 1984 – 2004. Data tersebut diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Pusat Statistik Propinsi D.I.Yogyakarta.

1.7.2. Model

Model meliputi dua macam, yaitu model teoritis dan model yang ditaksir. Sebelum dibentuk model teoritis dan model yang ditaksir terlebih dahulu diturunkan model dasarnya.

1.7.2.1. Penurunan Model

Model yang menunjukkan hubungan antara upah, pengangguran, serta inflasi diturunkan dari model *expectation augmented curve*, yaitu model yang semula digunakan untuk melihat hubungan fungsional antara inflasi dan pengangguran yang kemudian diperluas untuk melihat hubungan fungsional dari variabel-variabel di atas

(Setiaji, 2001:76). Penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan model tersebut antara lain oleh Mazumdar (1990) dengan menggunakan data Korea Selatan, aplikasi model yang sama juga dilakukan Setiaji (2001) untuk melihat perkembangan upah di Indonesia. Dalam skripsi ini penyusun hanya menggunakan 2 variabel *independent*, yaitu inflasi harapan dan pengangguran dalam mempengaruhi Upah Minimum Regional.

Pekerja melakukan ekspektasi (harapan) didasarkan pada informasi yang mereka miliki sehubungan dengan keinginan untuk memperoleh peningkatan upah sebagai dampak dari perbaikan produktifitas mereka yang sering dikaitkan dengan meningkatnya biaya hidup (*cost of living*), yaitu bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan pokok pekerja. Dalam model *expectation augmented Phillips curve* perkembangan upah dikaitkan dengan pengangguran yang tidak lain selisih antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Setiaji, 2001:76),

$$\dot{W} = \alpha \frac{D - S}{S} \quad (1.1)$$

Keterangan: \dot{W} = Perubahan upah.

D = Permintaan tenaga kerja.

S = Penawaran tenaga kerja.

$\frac{D - S}{S}$ = Ekses (kelebihan) permintaan tenaga kerja.

α = Suatu fungsi.

Dengan pengangguran ($D - S$) dilambangkan U dan pengangguran natural (S) dilambangkan U^* , persamaan (1.1) dapat diubah menjadi,

$$\dot{W} = \alpha \frac{U}{U^*} \quad (1.2)$$

atau

$$\dot{W} = \alpha(U - U^*) \quad (1.3)$$

Pengangguran natural merupakan pencari kerja yang tidak memiliki pekerjaan walaupun di pasar tenaga kerja total penawaran sama dengan total permintaan. Hal ini timbul, misalnya karena adanya informasi pasar yang tidak sempurna, tingginya biaya memperoleh informasi serta keahlian yang tersedia tidak cocok dengan yang diminta (Nopirin, 1982:37).

Ketika $U > U^*$ maka perubahan upah akan negatif (menurun), dan ketika $U < U^*$ maka perubahan upah akan positif (Setiaji, 2001:76). Perubahan tersebut tidak simetris yaitu lebih mudah melakukan perubahan upah ke atas pada waktu terdapat eksekusi permintaan sebab apabila permintaan tenaga kerja lebih banyak daripada penawaran, pihak industri akan mengorbankan biaya yang lebih tinggi untuk memperoleh seorang tenaga kerja dalam bentuk upah. Misalnya, di dalam pasar tenaga kerja hanya ada seorang tenaga kerja diminati oleh 2 perusahaan A dan B. Tentunya, perusahaan A dan B akan melakukan penawaran upah yang tinggi atau sebaliknya penawaran penetapan upah tersebut dilakukan oleh si pencari kerja dengan meminta upah yang tinggi. Dalam kondisi eksekusi penawaran, tidak mudah melakukan persentase perubahan upah ke atas karena melimpahnya tenaga kerja, dengan demikian pencari kerja sulit meminta upah yang tinggi.

Dengan memasukan harapan atas perubahan harga masa depan atau permintaan untuk kompensasi perubahan harga yang lalu dengan berasumsi 1% peningkatan dari tingkat ekspektasi harga inflasi (\dot{P}^e) akan meningkatkan *money-*

wage inflation yang berhubungan positif dengan kelebihan permintaan tenaga kerja pada γ persen, di mana nilai γ berkisar antara 0 dan 1 (Ehrenberg and Smith, 1991:629). Formulasinya sebagai berikut;

$$\dot{W} = \alpha X + \gamma \dot{P}^e \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \quad (1.4)$$

Keterangan: $\alpha X = \alpha \left[\frac{D-S}{S} \right] = \alpha(U - U^*)$, dan γ pada harga harapan \dot{P}^e menunjukkan harapan perubahan kenaikan upah terhadap perubahan harga harapan.

Persamaan (1.4) memperlihatkan hubungan antara upah, pengangguran dan inflasi harapan. Untuk menangkap harga harapan pelaku ekonomi dapat melakukan ekspektasi adaptif maupun ekspektasi rasional. Ekspektasi adaptif merupakan pendapat yang menyatakan bahwa harapan dari tingkat inflasi di masa mendatang didasarkan pada pengalaman inflasi yang baru saja terjadi. Sebagai contoh, serikat pekerja akan meminta kenaikan upah berdasarkan harapan inflasi yang teradaptasi lebih lanjut akan menaikkan harga-harga. Ekspektasi rasional merupakan hipotesa yang mengatakan bahwa perusahaan dan individu menafsirkan kejadian-kejadian yang akan datang tanpa prasangka dan dengan akses yang penuh pada informasi yang berhubungan pada saat keputusan harus diambil. Hanya informasi baru yang mempunyai dampak pada harapan atau perilaku (Pass & Lowes, 1994:5;557).

Dari persamaan tersebut dibentuklah model empirik sebagai berikut,

$$\dot{W}_t = a + b\dot{P}^e + cU_{t-x} \quad (1.5)$$

Keterangan: \dot{W}_t = Persentase perubahan dalam upah uang pada periode sekarang.

\dot{P}^e = Perubahan indeks biaya hidup konsumen atau tingkat inflasi harapan.

U_{t-x} = Tingkat pengangguran x periode sebelumnya.

1.7.2.2. Model Teoritis

Secara matematis fungsi Upah Minimum Regional dapat ditulis sebagai berikut;

$$UMR = f(LI^e, U) \quad (1.6)$$

$$f_{LI^e} > 0; f_U > 0$$

di mana: UMR = Upah Minimum Regional (Rp.).

LI^e = Laju Inflasi Harapan (%).

U = Pengangguran (Jiwa).

1.7.2.3. Model yang Ditaksir

Untuk mengetahui apakah persamaan yang ditaksir linear atau log linear maka dilakukan uji Mac Kinnon, White and Davidson (MWD) (Gujarati, 2003:280-281).

Apabila linear maka persamaan regresi yang digunakan:

$$UMR = \alpha_1 + \alpha_2 LI^e + \alpha_3 U + w \quad (1.7)$$

Tetapi jika persamaan regresinya log linear maka persamaan regresi yang digunakan:

$$\ln UMR = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln LI^e + \beta_3 \ln U + r \quad (1.8)$$

di mana: $\alpha_1, \ln \beta_1$ = Konstanta.

$\alpha_2, \alpha_3, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang berpengaruh.

w, r = Kesalahan prediksi (*error*).

Untuk melakukan uji MWD, digunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho: Model Linear: UMR merupakan fungsi linear dari variabel Laju inflasi harapan dan Pengangguran.

Ha: Model Log-Linear: $\ln UMR$ merupakan fungsi linear dari log variabel Laju inflasi harapan dan log variabel Pengangguran.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam MWD ini adalah:

1. Melakukan estimasi atau regresi terhadap persamaan (1.7), kemudian mencari *fitted* dari UMR yang dinamai dengan $UMRf$ (nilai *actual* UMR – residual).
2. Melakukan estimasi atau regresi terhadap persamaan (1.8), kemudian mencari *fitted* dari $\ln UMR$ yang dinamai dengan $\ln f$ (nilai *actual* $\ln UMR$ – residual).
3. Mencari Z_1 ($Z_1 = \ln UMRf - \ln f$).
4. Melakukan regresi pada persamaan (1.7) dengan menambahkan Z_1 :

$$UMR = \alpha_1 + \alpha_2 LI^e + \alpha_3 U + \alpha_4 Z_1 + \varepsilon \quad (1.9)$$

Ho ditolak jika koefisien Z_1 secara statistik signifikan dengan menggunakan uji t , maka model yang digunakan model log linear. ε merupakan kesalahan prediksi (*error*) yang baru setelah memasukan Z_1 kedalam persamaan.

5. Mencari Z_2 ($Z_2 = \text{anti } \ln f - UMRf$).
6. Melakukan regresi pada persamaan (1.8) dengan menambahkan Z_2 :

$$\ln UMR = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln LI^e + \beta_3 \ln U + \beta_4 Z_2 + u \quad (1.10)$$

Ha ditolak jika koefisien Z_2 secara statistik signifikan dengan menggunakan uji t , maka model yang digunakan model linear. u merupakan *error* yang baru setelah memasukan Z_2 kedalam persamaan.

1.7.3. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah program komputer EViews 3.0. Analisa regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen (tak bebas) terhadap satu atau lebih variabel independen (bebas) untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata populasi variabel dependen berdasarkan nilai tetap variabel independen (Gujarati, 2003:18).

Metode yang digunakan dalam mengestimasi parameter-parameter regresi adalah *Ordinary Least Square (OLS)* atau metode kuadrat terkecil, analisis ini dimaksudkan untuk menerangkan hubungan ketergantungan antara variabel *dependent* dan *independent*. Setelah diperoleh nilai dari parameter-parameter tersebut kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat signifikansi dari persamaan.

1.7.4. Uji yang Digunakan

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji statistika. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui pelanggaran asumsi klasik dan tingkat signifikan.

1.7.4.1. Uji Asumsi Klasik (*Second Order Conditon*)

Koefisien estimasi regresi yang diperoleh merupakan estimator terbaik dan tak bias (*BLUE = Best Linear Unbiased Estimator*), bila dipenuhi asumsi regresi klasik, yaitu adanya homokedastisitas, non-autokorelasi, dan tidak ada multikolinearitas. Dalam kenyataan sering kali ditemui adanya penyimpangan terhadap asumsi klasik ini sehingga perlu diadakan suatu pengujian untuk mengetahui sejauh mana asumsi klasik terpenuhi, adapun penyimpangan dalam asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas,

uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

1.7.4.1.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen lainnya. Bila variabel-variabel independen dalam model berkorelasi sempurna maka metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan (Sumodiningrat, 1996:281).

Bila variabel-variabel independen berkorelasi dengan sempurna maka disebut multikolinearitas sempurna (*Perfect multicollinearity*). Tujuan dari uji ini adalah menunjukkan adanya derajat kolinearitas yang tinggi di antara variabel-variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka digunakan metode regresi turunan (*auxilliary regresion*). Apabila model terdapat 3 variabel independen (termasuk konstanta) berarti model dapat ditulis sebagai berikut:

$$UMR_i = a_1 + a_2 LI_i^e + a_3 U_i + e_i \quad (1.11)$$

Multikolinearitas terjadi di antara variabel Laju inflasi harapan dan Pengangguran. Uji regresi turunan diperoleh dari nilai R_i^2 hasil regresi turunan antara variabel independen dengan variabel independen yang lain. Oleh karena kolinearitas timbul disebabkan adanya satu atau lebih variabel independen yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel independen lainnya, salah satu cara untuk mengetahui variabel independen yang mana berkorelasi dengan variabel lainnya ialah dengan membuat regresi setiap variabel independen terhadap sisa variabel lainnya dan menghitung R^2 dan kita beri simbol R_i^2 . Hubungan antara R_i^2 dengan F_i adalah (Supranto, 2004:28):

$$F_{LI^e} = \frac{R_{LI^e, U_i}^2 / (k - 2)}{(1 - R_{LI^e, U_i}^2) / (n - k + 1)}$$

di mana:

$R_{LI^e}^2$ adalah koefisien determinasi dari regresi

$$LI_i^e = \lambda_1 + \lambda_2 U_i + v_i \quad (1.12)$$

k adalah banyaknya variabel independen termasuk konstanta, n adalah banyaknya sampel, dan v_i merupakan kesalahan pengganggu (*disturbance's error*).

Apabila F hitung $> F$ tabel maka hal ini berarti bahwa variabel independen LI_i^e mempunyai korelasi dengan variabel independen U_i , dengan demikian terjadi multikolinearitas. Apabila F hitung $< F$ tabel maka hal ini berarti bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen LI_i^e dengan variabel independen U_i , dengan demikian tidak ada multikolinearitas.

1.7.4.1.2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah varian dari komponen pengganggu (varian residual) akan konstan. Uji heterokedastisitas umum yang diusulkan oleh *White Heteroskedasticity Test* tidak sepenuhnya merupakan asumsi normalitas dan mudah untuk di implementasikan (Gujarati, 2003:413).

Gejala heterokedastisitas ini dapat dideteksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Menaksir atau mengestimasi model dasar untuk mendapatkan nilai residual, \hat{e}_i .

$$UMR_i = \beta_1 + \beta_2 LI_i^e + \beta_3 U_i + e_i \quad (1.13)$$

2. Menaksir persamaan berikut (*auxiliary*).

$$\hat{e}_i^2 = \alpha_1 + \alpha_2 LI_i^e + \alpha_3 U_i + \alpha_4 LI_i^{e^2} + \alpha_5 U_i^2 + \alpha_6 LI_i^e U_i + v_i \quad (1.14)$$

di mana: \hat{e}_i^2 = Logaritma natural dari kuadrat nilai residual.

α_1 = Konstanta atau titik potong (*intercept*).

$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ = Koefisien slope.

e_i, v_i = Variabel pengganggu.

3. Melakukan pengujian dengan membandingkan nilai Obs*R-squared ($n.R^2$) yang diperoleh dari persamaan *auxiliary* mengikuti distribusi *chi-square* (χ_{df}^2), di mana *df* merupakan jumlah regressors (tidak termasuk konstanta). Apabila nilai Obs*R-squared $< \chi_{df}^2$ maka regresi tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila nilai Obs*R-squared $> \chi_{df}^2$ maka regresi terdapat heterokedastisitas.

1.7.4.1.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan (korelasi) antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada runtut waktu atau *time series data*) atau yang tersusun dalam serangkaian ruang (seperti pada *cross – sectional data*). Metode pengujian yang digunakan adalah metode Durbin – Watson, yaitu suatu jenis pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi yang telah dikembangkan oleh J. Durbin and Watson tahun 1951 (Sumodiningrat, 1996:245).

Hipotesis yang digunakan adalah:

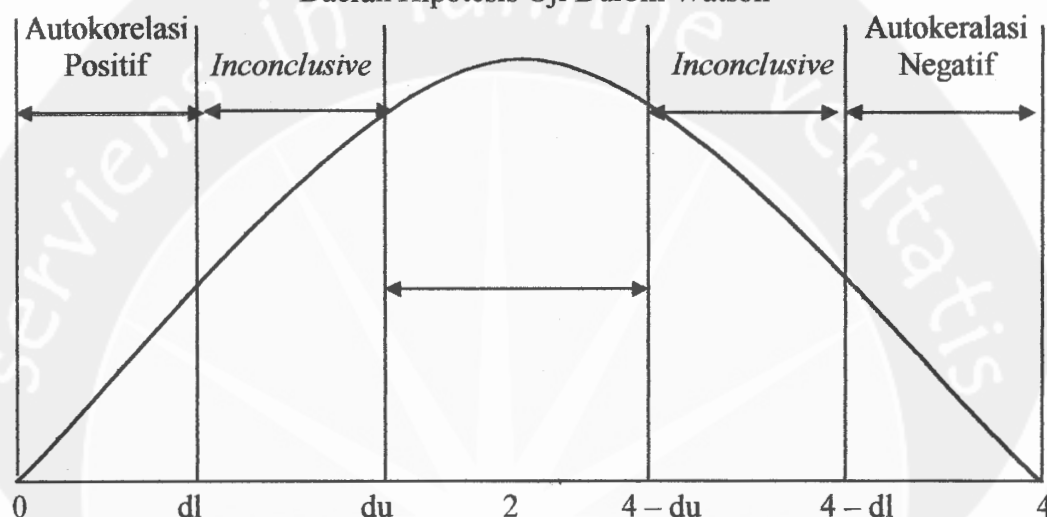
Ho : Tidak terjadi autokorelasi, baik positif maupun negatif.

❖ DW hitung $< dl$: Ho ditolak, berarti terjadi autokorelasi positif.

❖ DW hitung $> 4 - dl$: Ho ditolak, berarti terdapat autokorelasi negatif.

- ❖ $du < DW \text{ hitung} < 4 - du$: H_0 tidak ditolak, berarti tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
- ❖ $dl < DW \text{ hitung} < du$ atau $4 - du < DW \text{ hitung} < 4 - dl$: artinya pengujian kurang meyakinkan atau tidak bisa disimpulkan (*Inconclusive*).

Gambar 1.1
Daerah Hipotesis Uji Durbin Watson



1.7.4.2. Uji Statistik (*First Order Condition*)

Uji statistik atau yang dikenal dengan *FOC* pada dasarnya diajukan untuk menguji hasil regresi yang diperoleh. Dalam hal ini penyusun menekankan uji statistik ini pada Uji *F* (*Fischer test*), Uji *t* (*student test*), dan Uji koefisien determinasi R^2 (*multiple regression*).

1.7.4.2.1. Uji *F*

Uji *F* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh secara statistik terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui nilai *F*, maka formulasi yang digunakan adalah (Gujarati, 2003:257):

$$F = \frac{ESS / (k - 1)}{RSS / (n - k)}$$

di mana: *ESS* = *Explained Sum of Squares*.

RSS = *Residual Sum of Squares*.

$k - 1$ = Derajat kebebasan pembilang.

$n - k$ = Derajat kebebasan penyebut.

n = Jumlah observasi.

k = Banyaknya variabel independen termasuk intersep.

Adapun hipotesa yang digunakan adalah:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq \beta_n \neq 0$$

Untuk melihat signifikansi variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen, maka kita harus membandingkan nilai F hitung dan F tabel. F tabel dapat dilihat pada tabel *F-statistic*, dengan melihat tingkat signifikansi (α) dan nilai *df* (*degree of freedom*), yaitu *df* numerator dan *df* denominator. Untuk uji F ini digunakan uji satu sisi sehingga nilai tabelnya yaitu ($\alpha; df_1; df_2$). Besarnya nilai F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Untuk membandingkan nilai F hitung dan F tabel, aturannya adalah:

- ❖ Jika F hitung $>$ F tabel berarti H_0 ditolak, yang artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- ❖ Jika F hitung $<$ F tabel, berarti H_0 tidak ditolak, yang mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen.

1.7.4.2.2. Uji t

Uji t dikenal sebagai uji parsial yang digunakan untuk melihat berarti tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dapat dipersingkat dengan mengadopsi "2-t" *rule of significance*, yang dinyatakan sebagai "2-t" *Rule of Thumb*. Jika jumlah derajat kebebasan 20 atau lebih dan α ditetapkan pada 0,05. Adapun formulasi untuk menghitung nilai t , adalah (Gujarati, 2003:134);

$$t = \frac{\hat{\beta}_2}{se(\hat{\beta}_2)}$$

di mana: t = t hitung.

$\hat{\beta}_2$ = *Estimator*.

$se(\hat{\beta}_2)$ = *Estimated standard error of estimator*.

Untuk mengetahui diterima tidaknya hipotesa nol, maka kita harus membandingkan nilai t hitung $\left[= \hat{\beta}_2 / se(\hat{\beta}_2) \right]$ dengan $t_{\alpha/2, n-k}$ yang merupakan nilai t (nilai kritis t) diperoleh dari t tabel untuk tingkat signifikan ($\alpha/2$) dan derajat kebebasan ($n - k$). Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

Dengan aturan sebagai berikut:

❖ $H_0 : \beta_2 = 0$ ditolak, jika $|t| = \left| \frac{\hat{\beta}_2}{se(\hat{\beta}_2)} \right| > t_{\alpha/2, n-k}$. Artinya, variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

❖ H_0 tidak ditolak, jika $|t| = \left| \frac{\hat{\beta}_2}{se(\hat{\beta}_2)} \right| < t_{\alpha/2, n-k}$. Artinya, variabel independen tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

1.7.4.2.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur kebaikan dari persamaan regresi yaitu menjelaskan besarnya persentase variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$.

1. Rumus koefisien determinasi dapat dinyatakan sebagai berikut (Gujarati, 2003:84);

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

atau

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

di mana: ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan (*Explained Sum of Squares*).

TSS = Jumlah kuadrat total (*Total Sum of Squares*).

RSS = Jumlah kuadrat residual (*Residual Sum of Squares*).

Nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin besar variasi perubahan yang terjadi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel independen dalam model. Bila nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan bahwa semakin kecil variasi perubahan yang terjadi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi perubahan independen dalam model.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II. LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat teori upah dengan pendekatan *Phillips Curve* sehingga dapat digunakan sebagai kerangka analisis.

Bab III. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum meliputi hasil pengamatan terhadap obyek penelitian, yaitu pada perkembangan Upah Minimum Regional di Propinsi D.I. Yogyakarta.

Bab IV. ANALISIS DATA

Isi dalam bab ini merupakan analisa hasil penelitian dari data yang diolah mengenai studi UMR di Propinsi D.I. Yogyakarta dengan pendekatan Kurva Phillips.

Bab V. KESIMPULAN

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dan implikasi kebijakan yang sesuai dengan hasil analisis penelitian yang dilakukan berupa rekomendasi atau saran.